

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM. 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN
 DAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

Contoh 1

Bentuk Surat Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ..., ... (*kota, tgl bulan tahun*)

Lampiran :

Perihal : **Permohonan** **Kepada**
Penetapan Lintas
Pelayanan
Perkeretaapian

Yth. ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur*
..., atau Bupati/Walikota ...)

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian untuk:
 - a. lintas pelayanan ...
 - b. jenis angkutan ...
 - c. jenis pelayanan kereta api (untuk angkutan orang/angkutan barang).
2. Sebagai persyaratan terlampir berupa:

- a. salinan izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.
 - b. analisis untuk bahan pertimbangan penetapan lintas pelayanan yang meliputi:
 - 1) jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - 2) kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - 3) keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - 4) jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/stasiun; dan
 - 5) ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.
3. Demikian permohonan ini disampaikan terima kasih.

Direktur Utama

PT. ...

.....

(Nama dan Cap Perusahaan)

Contoh 2

Bentuk Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (*MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...*)

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

... ,

(MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR ... /BUPATI/WALIKOTA ...)

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahun tentang Tata Cara Penetaapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, telah diatur mengenai penetapan lintas pelayanan perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan mobilitas masyarakat dan kebutuhan pelayanan angkutan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian dari ...
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan ...(*Menteri Perhubungan/Gubernur .../Bupati/Walikota ...*) tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN/GUBERNUR .../BUPATI/WALIKOTA ...)/TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.**

PERTAMA : Menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian ... (*antarkota dan/atau perkotaan*) sebagaimana Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lintas pelayanan sebagaimana Diktum PERTAMA dapat berubah dan penetapannya dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : ... (*Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... / Bupati/Walikota ...*) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

**MENTERI PERHUBUNGAN/
 GUBERNUR ... /
 BUPATI/WALIKOTA ...**

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 3

Bentuk Surat Penolakan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

(KOP INSTANSI)

Nomor :, ... (kota, tgl bulan tahun)

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan Kepada
Permohonan
Penetapan Lintas
Pelayanan

Yth. Direktur Utama

PT ...

di ...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan permohonan penetapan lintas pelayanan yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a. ... ,
 - b. ... ;dst. (di isi alasan penolakan)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penetapan lintas pelayanan setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

TembusanYth.:

1. ...
2. ...; dst (instansi terkait).

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN